

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abdhul yusuf (2023). Teknik Pengambilan Sampel Penelitian: Macam dan Penjelasan. deepublishstore.com.
- Ariestadi, Dian, 2008. Teknik Struktur Bangunan. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, A., & Suwarjono. (2016). Sistem Informasi Geografis Pendataan Bangunan Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Merauke. In Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM) (hal. 263–268).
- Nur Yanto, 2015. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Mitra Wacana Media Jakarta
- Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD. (2004). Jenis-jenis Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara. Kota Makassar: SANKRI buku III
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Shopia, 2023. Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo. *Diploma thesis, IAIN Palopo*.
- Sjachran, Basah, 2004. “Hukum Tata Negara Perbandingan”, Bina Aksara, Jakarta.
- Sumoharjo, 2009, Pengertian Bangunan, Sukoharjo
- Suriansyah, M. (2008). Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. Laksbang: Mediatama.
- Widyastuty, A.A.S & Wulandari, D. 2021. Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Fungsi Bangunan berdasarkan Instrumen Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gresik. Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021, 247-255.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

## **C. Lain-lain**

Penegakkan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin menurut undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, diakses dari <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32056>, pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 09.11 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 09.54 WITA

<https://legalitas.org/imb-diubah-jadi-pbg>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 10.30 WITA

<https://kukarpaper.com/pemkab-kukar-ikuti-sosialisasi-pelaksanaan-retribusi-persetujuan-bangunan-gedung/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 14.03 WITA

<https://simbg.pu.go.id/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 14.40 WITA

<https://oss.go.id/informasi/faq/62e0241dd4c14c2600ff6d32>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 19.42 WITA, diakses dari <https://dpmpstsp.kukarkab.go.id/>

<https://jdih.kukarkab.go.id/produk-hukum/peraturan/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah>, diakses pada tanggal 14 Juni 2025 pukul 00.37 WITA